

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	vi
ABSTRAKSI	vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Kegunaan Penelitian	12
1. Manfaat Teoritis.....	12
2. Manfaat Praktis.....	12
E. Sistematika Penulisan	13

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Tentang Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.....	16
1. Pengertian Peran PPID	16
2. Tugas dan Tanggung Jawab PPID	20
B. Kajian Umum Tentang Pelayanan dan Penyediaan Informasi Publik.....	22
1. Pengertian dari Pelayanan dan Penyediaan.....	22

2. Pengertian dari Informasi Publik	27
C. Kajian Umum Tentang Implementasi	
1. Pengertian Implementasi.....	31
2. Implementasi Sebagai Hasil Kebijakan Pemerintah	33
D. Kajian Umum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang	
Keterbukaan Informasi Publik.....	36
1. Kerangka Hukum.....	36
2. Prinsip-Prinsip Umum KIP	38
E. Keterbukaan Informasi Publik Dalam Wujud Tata Kelola Pemerintahan	
yang Baik (Good Governance)	41
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Metode Pendekatan.....	49
B. Lokasi Penelitian.....	49
C. Jenis dan Sumber Data	50
D. Teknik Pengumpulan Data	53
E. Populasi dan Sampel	55
F. Teknik Analisa Data	55
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Tentang Lokasi Penelitian.....	59
1. Gambaran Umum tentang Kota Malang	59
a. Kondisi Geografis.....	59
b. Visi dan Misi Kota Malang	60

2. Gambaran Umum Dinas Komunikasi dan Informatika	66
a. Lokasi	66
b. Dasar Hukum Dinas Komunikasi dan Informatika	66
c. Tugas Pokok	67
d. Fungsi	67
B. Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Dalam Pelayanan dan Penyediaan Informasi sebagai Bentuk Kewajiban Bagi Badan Publik ..	71
1. Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pada Pemerintah Kota Malang	72
2. Peraturan Walikota Malang Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik sebagai bentuk Implementasi Undang- Undang Nomor 14 tentang KIP pada Pemerintah Kota Malang	75
3. Prinsip-Prinsip Pelayanan Informasi Publik berdasar Peraturan Walikota Malang Nomor 50 Tahun 2010	76
4. Peran PPID berdasar Pedoman Pelayanan Informasi Publik Pemerintah Kota Malang	76
a. Peran PPID	76
b. Tugas PPID (Pasal 12)	78
c. Tanggung Jawab PPID (Pasal 13)	79
d. Wewenang PPID (Pasal 14)	79
5. Mekanisme Permohonan Pelayanan Informasi Pada Pemerintah Kota Malang	81
C. Hambatan-hambatan Terhadap Peranan Fungsi PPID dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008	84

1. Keterbatasan Personil/Sumber Daya Manusia (SDM) yang Khusus Menangani Penyediaan Pelayanan Informasi di Beberapa SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Malang termasuk Kemampuan dan Pengetahuan Dalam Bidang Teknologi Informasi.....	84
2. Lemahnya Pemahaman Akan Tugas dan Fungsi Sebagian SKPD Menyangkut Penyediaan Pelayanan Informasi Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	85
3. Kendala Penyediaan Infrastruktur dan Ketersediaan Anggaran.....	86

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	89
B. Saran	91

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

